

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PT.TANSATRISNA MAJU BERSAMA**

SKRIPSI



**Nama : Sandika
NIM : 22 2012 330**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PT.TANSATRISNA MAJU BERSAMA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Sandika
NIM : 22 2012 330**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandika

NIM : 22 2012 330

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis,


Sandika
NIM: 222012330

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk
Menghitung PPH Badan Pada PT. Tansatrisna
Maju Bersama
Nama : Sandika
NIM : 22 2012 330
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,**

Pembimbing,



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

**Mengetahui,
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Puntung
2. Suro Diro Jayadiningrat Lebur Dening Pangastuti

(Sandika)

Dengan Izin-Mu dan dengan Rahmat-Mu
yaa Allah Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibuku dan Bpk Tercinta
- ❖ Adik Saya “DESTIA”
- ❖ Pacarku
- ❖ Pembimbing Akademik dan Skripsi
- ❖ Almamater



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Tansatrisna Maju Bersama”, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Shalawat beriring salam tak lupa senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta Rasullah SAW, keluarga dan sahabat sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai- nilai Islam yang banyak menjadi suritauladan dan banyak telah mengibarkan panji-panji kebenaran dari masa lampau hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi serta berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis, Ibu Bpk tercinta Ibu Nani Rohani dan Bapak Kayono yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi, semangat, nasihat serta kasih sayang yang sedemikian tulus. Dan juga kepada semua saudaraku Destia sekaligus Calon pendimpingku Aida Mawaddah yang telah memberikan inspirasi dalam hidup saya terima kasih karena telah memberikan perhatian, kasih sayang, inspirasi, berbagai canda tawa serta selau memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang membangun dan sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi dan sekretaris program studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,
Penulis

SANDIKA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Mantaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	9

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel	32
D. Data yang Diperlukan	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil penelitian.....	41
1. Sejarah Umum PT.Tansatrisna Maju Bersama	36
2. Visi dan misi perusahaan	37
3. Struktur organisasi.....	38
4. pembahasan.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Penelitian sebelumnya	10
Tabel II. 2 Masa manfaat harta.....	24
Tabel III. 1 Operasional Variabel	32
Tabel IV. 1 Laporan laba rugi.....	48
Tabel IV. 2 rincian biaya sumbangan, entertainmen, pengobatan	49
Tabel IV. 3 rincian biaya lain-lain	50
Tabel IV. 4 Koreksi fiskal	51
Tabel IV. 5 Biaya lain-lain yang bisa di bebaskan	52
Tabel IV. 6 Biaya lain-lain yang tidak bisa di bebaskan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat KKN (Kuliah Kerja Nyata)
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 Jadwal Penelitian
- Lampiran 7 Biodata Peneliti

ABTRAK

Sandika 22 2012 330 Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama. Rumusan Masalah Apa yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos apa saja yang dikoreksi Dan Bagaimana dampak rekonsiliasi/koreksi terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Komperatif. Tempat penelitian di lakukan pada PT.Tansatrisna Maju Bersama. Variabel penelitian adalah Rekonsiliasi Fiskal, Perhitungan PPh badan dan Penyebab pengakuan biaya komersii dan fiskal. Data yang di gunakan adalah data skunder. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara dan langsung turun ke lapangan ke perusahaan langsung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat biaya-biaya yang tidak di akui pajak dalam laporan laba rugi setelah di lakukan koreksi fiskal dan Kemudian memberikan pengaruh kenaikan yang signifikan terhadap laba sebelum pajak atau yang di sebut juga penghasilan kena pajak dari yang sebelumnya dan berdampak terjadi kurang bayar jika tidak di lakukan koreksi fiskal.

Kata Kunci: Penerapan laporan rekonsiliasi fiskal, perhitungan PPh Badan

Abstract

Sandika/222012330/The analysis of Fiscal reconciliation Reports on Commercial Financial Report to Count the Corporate Tax of PT.Tansatrisna Maju Bersama.the problems of study were what cause the differences between financial report by commercial accounting and tax accounting, what posts that have been corrected, and what the effect of reconciliation/correction on payable income tax. This study was comparative research that was conducted at PT.Tasatrisna Maju Bersama. The variables in this study were fiscal reconciliation, corporate tax calculation, and the causes of commercial and fiscal cost. The data used in this study was secondary data. The methods for collecting the data were documentation, interview, and direct observation on the company.

The result of this study found that there were some unrecognized costs that were not included on tax income statement after fiscal correction was conducted. Furthermore, it gave significant increase on the income before the tax or income tax before that affected on less pay if fiscal correction was not conducted.

Keywords: Fiscal Reconciliation Report Implementation, Corporate Income Tax Calculation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari negara yaitu diantaranya dari sektor pajak. Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat/wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya

Apa yang anda bayangkan ketika mendengar pajak? Sebagian orang awam akan takut untuk menghadapinya karena berbagai informasi dan berita mengenai pajak dapat membuat orang berpikir dua kali untuk tidak peduli ataupun was-was dalam pelaksanaannya. Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk

menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak mungkin dilakukan oleh pajak baik berupa perlawanan secara aktif maupun secara pasif

Salah satu isu yang menarik saat ini di Indonesia adalah *book tax differences* yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Peraturan perpajakan dan akuntansi mempunyai tujuan dan dasar penyusunan yang berbeda, sehingga muncul hampir disemua negara mengalami perbedaan tersebut

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun tidak sampai saat ini masih menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia yaitu standar akuntansi keuangan, dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berasal dari hal tersebut kemudian muncul istilah laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial bertujuan untuk menyajikan informasi yang terjadi selama periode tertentu, menilai kinerja ekonomi dan keadaan keuangan. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang lebih bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang, sehingga perbedaan dasar penyusunan dan tujuan kedua laporan keuangan

tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas.

Pada sebuah badan usaha, aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi pada perusahaan, besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berdoman pada (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan.

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dsibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen.

Standar pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal tidak sama. Ketidaksamaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. *Book tax differences* terbentuk karena disebabkan oleh perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer terjadi karena terdapatnya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial.

dan perbedaan permanen yang terjadi karena terdapatnya pengaturan yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi. Apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha) yang efektif serta efisien, yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan banyak pihak, maka untuk menyamakan persepsi terhadap laporan keuangan ini digunakan standar penilaian dan pengukuran yang berlaku umum. Di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan komersial digunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun takwim. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya, transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak. Atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan perpajakan mempunyai motivasi untuk mempersempit erosi potensi pengenaan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara Khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun

laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Berdasarkan temuan yang ada pada saat melaporkan SPT tahunan PT.Tansatrisna Maju Bersama terdapat biaya yang perlu di koreksi sebesar Rp.4.655.133.787 maka dari itulah perlu di lakukan koreksi fiskal, penyebab karna banyak hal yang terjadi seperti terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain seperti pengakuan penghasilan atau pendapatan atau omzet, pengakuan biaya dan juga terjadinya perbedaan temporer (beda waktu) antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain perbedaan lamanya jangka waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam menentukan pos-pos dalam laporan laba rugi, perbedaan saat atau waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak.

Oleh sebab itu banyak yang perlu di koreksi dari segala penyebabnya, maka di buat suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos apa saja yang dikoreksi?
- b. Bagaimana dampak rekonsiliasi/koreksi terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan secara akuntansi dan secara perpajakan gambaran pengakuan laba sebelum pajak dengan menggunakan perhitungan menurut standar akuntansi dan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah penguasaan bagi diri sendiri dan berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem perpajakan di Indonesia,

terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku

2. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada laporan laba rugi

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Di Indonesia, Penelitian mengenai perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dilakukan oleh Wijayanti (2006). Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguji perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dalam mengindikasi persistensi laba, akrual, dan arus kas untuk satu periode ke depan. Penelitian tersebut menguji apakah tingkat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal mempengaruhi penilaian investor terhadap persistensi laba masa depan. Dengan menggunakan data perusahaan dari tahun 2000-2004, hasil penelitian Wijayanti (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan large positif *book-tax differences* signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya daripada perusahaan dengan small *book-tax differences*. Selanjutnya, penelitian tersebut memberikan bukti bahwa investor menginterpretasi large positive *book-tax differences* sebagai “*red flag*” dan mengurangi harapan mereka terhadap persistensi laba masa depan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nidia Kurniasi (2008) peneliti melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi Dengan menggunakan model distribusi laba, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual tidak terbukti dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari penurunan laba. Asep safat hidayat (2008) menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak

positif yang besar mempunyai persistensi laba yang lebih rendah. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kualitas laba, dalam hal ini persistensi laba masa depan.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	(Nama/Thn) Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wijayanti (2006) Analisis Perbandingan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Untuk Mengindikasikan Persistensi Laba Pada PT.INK	Sama-sama membahas perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal	Perbedaan dilihat dari lokasi peneliti sebelumnya di PT.INK sedangkan peneliti saat ini di PT. Tangkas
2	Nidia kurniasi (2008) Analisis Koreksi Fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tanggungan dalam penentuan pajak penghasilan yang terhutang pada PT. Suprex Raya	Sama-sama melakukan koreksi fiskal atas laba/rugi	Di lihat dari lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di PT Suprex raya sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pt tangkas
3	Asep safat hidayat (2008) Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan PPh terhutang pada PT. Indomix Perkasa	Persamaan sama-sama melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan	Peneliti sebelumnya lokasi penelitian, dan peneliti sebelumnya hanya melakukan rekonsiliasi dan memberikan masukan jumlah pajak yang harus di bayar sedangkan peneliti sekarang melakukan koreksi fiskal saja dan memberi

			masukannya biaya-biaya yang bisa dibebankan dan tidak
--	--	--	-------------------------------------------------------

Sumber: Penulis 2016

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut PP No 71 (2010:6) adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahan bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna.

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

a) Menurut Reeve Warren, dkk (2010:9)

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

b) Menurut Keiso, et al. (2010:10)

Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

c) Menurut *American Accounting Association* (Soemarso, 2008:3)

Akuntansi merupakan "proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan, informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian

dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

2. Laporan Keuangan

Menurut PP No.71 Tahun (2010:60) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode yang menghasilkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Neraca laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu, laporan arus kas laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan, catatan atas Laporan Keuangan juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi seperti Aset, kewajiban, dan ekuitas. sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK (2009:3) Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subyektif diminimalkan. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa

depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomi. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomi.

4. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna Laporan keuangan menurut Harahap (2010:7) diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan seperti pemegang saham, pimpinan, investor, bank pemerintah (kantor pajak), dan sebagainya. Para pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua pihak internal dan pihak eksternal, yaitu:

a. Pihak internal

Pihak internal ialah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya pemimpin perusahaan (manajer). Manajer sebagai pengelola perusahaan dan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Banyaknya jenis data yang dibutuhkan oleh seorang manajer tergantung dari besar kecil perusahaan yang dikelolanya. Informasi ini dibutuhkan oleh manajer untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang akan dijalankan.

b. Pihak Eksternal

Pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Pihak eksternal diantaranya

sebagai berikut: Pemilik perusahaan, memerlukan informasi akuntansi pada waktu tertentu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaannya.

Investor & pemegang saham, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan yang akan datang. Informasi ini dijadikan pertimbangan dasar untuk menanamkan modal atau tidak pada perusahaan tersebut. Kreditor, memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Pemerintah, berkepentingan terhadap informasi akuntansi suatu perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan. Dari laporan keuangan yang ada, pemerintah dapat menentukan jumlah pajak dan penetapan pajak dari perusahaan tersebut. Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Masyarakat, terutama yang berada disekitan perusahaan, karena perusahaan berkepentingan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

5. Penghasilan

Menurut UUD No.36 Tahun 2008 Pasal.4 Ayat.1 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan juga merupakan macam kegiatan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada perusahaan yang nantinya dapat

menambah modal perusahaan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berupa penyerahan jasa atau barang dagangan kepada konsumen. Secara spesifik penghasilan masih sulit untuk didefinisikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ragam dalam penentuan penghasilan dan pengaruh faktor lain yang kadang sulit untuk disatukan.

Dari definisi diatas, maka penghasilan dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dari:

- a. Peningkatan jumlah aktiva perusahaan dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Penghasilan yang diperoleh diukur dengan besarnya aktiva yang diperoleh sebagai penukar atas jasa yang telah ditukarkan.
- b. Penurunan kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari pembatalan hutang perusahaan terhadap kreditur atau pihak lain.
- c. Aktivitas usaha lain yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan

demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

6. Biaya dan Beban

Pengertian biaya dan beban menurut PP No.71 (2010:96) dalam akuntansi ada dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran dalam suatu perusahaan, yaitu biaya dan beban. Beban (*expense*) dan biaya (*cost*) sering dirancukan tergantung dari tujuan pemakaian istilah tersebut. Pengertian biaya telah mendefinisikan *cost* sebagai suatu nilai tukar, prasarat atau pengorbanan yang dilakukan guna mendapatkan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal terjadinya dinyatakan pengurangan kas atau harta lainnya pada saat kini atau dimasa depan”. Sedangkan pengertian beban *Expense* dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari barang atau jasa, yang akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menentukan laba (*income*)”.

7. Akuntansi Pajak

Menurut Agoes (2010:2) Akuntansi Pajak adalah akuntansi pajak yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi management atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan, akuntansi pajak yang di terapkan sesuai dengan peraturan perpajakan di sebut akuntansi pajak, akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak

tidak memiliki standar seperti seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), akuntansi pajak hanya di gunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, dengan adanya akuntansi pajak, WP lebih mudah menyusun SPT.

8. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli:

1. Menurut Mardiasmo (2007;20)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Menurut Sumarsan (2010;4)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

3. Menurut Nurmantu (2006;1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum“

4. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Pajak adalah iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembaayran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

9. Fungsi Pajak

Menurut Siti (2009:3) Fungsi (Budgeter) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

10. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pajak penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari definisi diatas, bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh wajib pajak merupakan ukuran kemampuan wajib pajak untuk ikut menanggung beban atau beban yang dibutuhkan pemerintah untuk kegiatan pemerintah.

11. Penghasilan yang Menjadi Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU hukum perdata atau hukum dagang, bentuk usaha dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus dibidang sosial ekonomi untuk mencari laba.

12. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada persero, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan yang diperoleh persero, persekutuan dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai beban bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- f. Royalti
- g. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta
- h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- i. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- k. Selisih karena penilaian kembali aset
- l. Premi Asuransi
- m. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- n. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Semakin besar beban fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba usaha sebelum pajak dan otomatis mengurangi jumlah pajak yang terutang.

13. Koreksi Fiskal

Menurut Djoko (2010:12) Koreksi adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Koreksi ini dimaksudkan untuk meniadakan antara laporan keuangan komersial yang

mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Beda tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Atau biasa dijelaskan bagi perusahaan semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak. Sedangkan bagi Ditjend Pajak, tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan.

2. Beda Waktu (*Time Difference*)

Beda waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Atau biasa disebut juga perbedaan yang diakibatkan karena bedanya waktu pengakuan baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan

yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur Ekonomis atas Aset tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut

14. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial & fiskal

Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut IAI (2009:13) antara lain yaitu:

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan
2. Perbedaan konsep biaya
3. Perbedaan nilai konsep penyusutan dan nilai persediaan

15. Penyusutan Fiskal

Menurut IAI (PSAK. 2009:40) Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, saat menghitung penghasilan kena pajak, adalah biaya Penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi yang lazim namun sebenarnya peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam soal penghitungan biaya Penyusutan. Penyusutan dibagi menjadi kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bangunan dibagi menjadi 4 bagian lagi yang memiliki masa manfaat yang berbeda-beda.

16. Usia atau Masa Manfaat Harta

Dalam menentukan usia atau masa manfaat harta, fiskal juga memiliki aturan tersendiri yaitu seperti yang dicantumkan dalam Pasal 11 maupun Pasal 11A UU PPh UUD No.36 Tahun 2008 Dalam kedua pasal ini, usia atau masa manfaat harta ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II.2
Masa Manfaat Harta

Harta Berwujud	Usia Fiskal	Tarif Penyusutan	
		GL	SM
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: UUD No.36 Tahun 2008

17. Timbulnya Koreksi Fiskal

Terjadinya koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yaitu:

1. Terjadinya Perbedaan Tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba, antara lain:
 - a. Pengakuan Penghasilan atau pendapatan atau omset
 - b. Pengakuan biaya

2. Terjadinya Perbedaan Temporer (beda waktu) antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba, antara lain :
 - a. Perbedaan Lamanya atau jangka waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba,

- b. Perbedaan saat atau waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba,

18. Jenis Koreksi Fiskal

Hanya terdapat dua jenis koreksi fiskal menurut UUD No.36 Tahun 2008 yang dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi negatif. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak. Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak

19. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Besarnya penghasilan kena pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak terutang. Tetap berlandaskan pada laporan laba rugi fiskal perusahaan yang telah dikoreksi positif dan koreksi negatif. Cara menghitung pajak penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak. (*Pajak Terutang = Tarif pajak x Penghasilan Kena Pajak (Laba)*)

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri pada dasarnya ada dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu:

- a. Perhitungan PPh dengan dasar pembukuan
- b. Perhitungan PPh dengan dasar pencatatan

Pajak penghasilan badan memiliki tarif yang berlaku berdasarkan pada undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 E

1. Omset $\leq 4,8$ M = Tarif 50% x 25% x PKP
2. Omset $> 4,8$ M ≥ 50 M =
 - a. 50% X 25% x PKP
 - b. 25% x PKP
3. Omset diatas = 50M = Tarif 25% x PKP
4. PP No. 46 2013 = 1% x Omset

Peraturan ini baru dan mulai berlaku per 1 Juli 2013

20. Laba

Laba usaha menurut Baridwan, (2009;29) adalah kenaikan modal (aset bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Jika pengertian laba itu dilihat dari segi penghasilannya, maka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Laba yang sudah direalisasi, yaitu laba yang sudah bisa diakui pada saat terjadinya karena adanya transaksi penjualan
- b. Laba yang terjadi karena peningkatan kekayaan, yaitu merupakan akibat dari kenaikan nilai aset dan belum terjadi transaksi pertukaran, yang mana laba ini tidak bisa diakui sampai aset yang bersangkutan dijual.

Berdasarkan pada pengertian tersebut terdapat sifat yang melekat pada laba itu sendiri, misalnya:

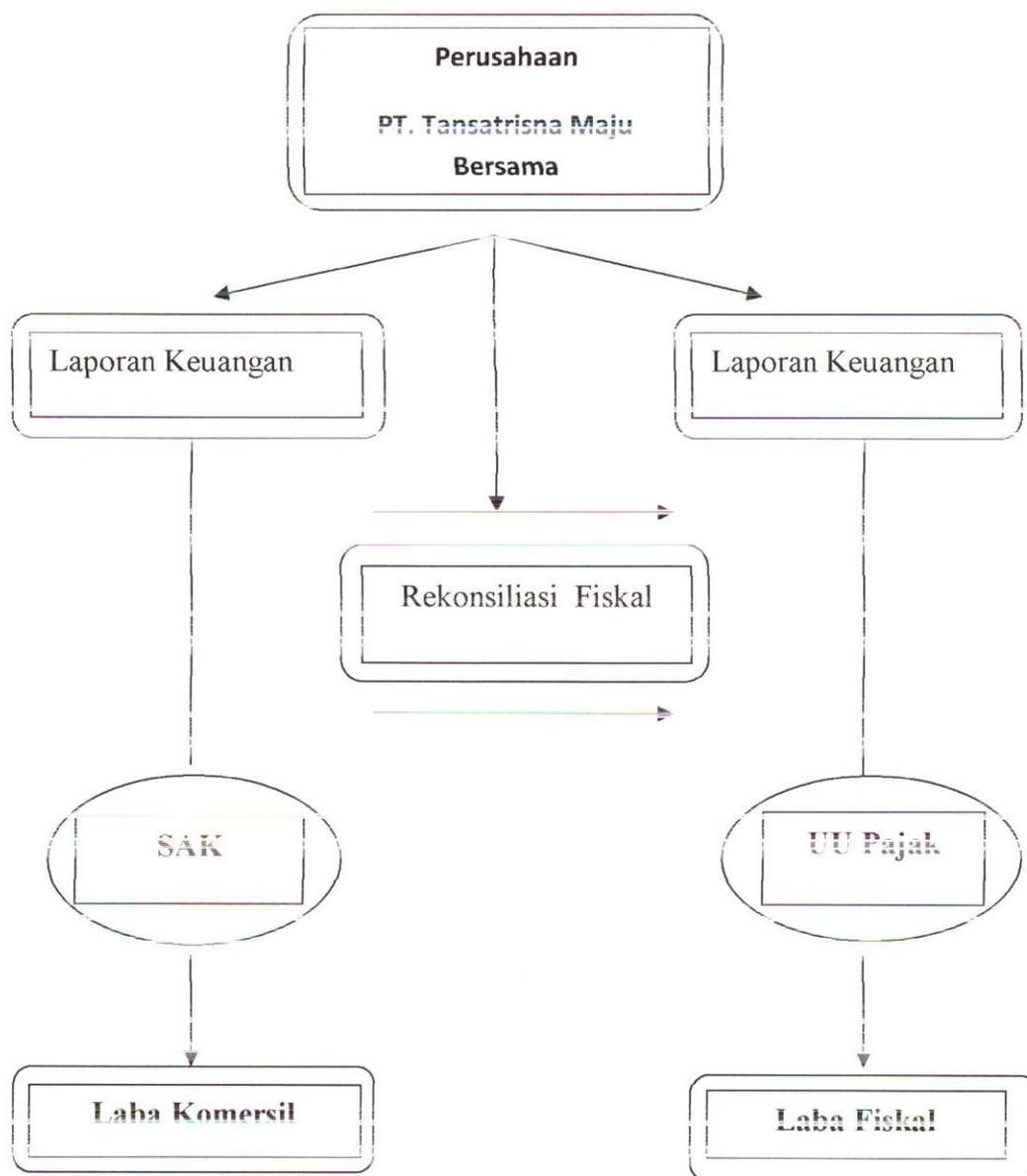
- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.

- c. Untuk mendapatkan laba diperlukan perhitungan biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan.

21. Kerangka Pikir

Gambar IV.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: UUD No.36 Tahun 2008

Pada setiap akhir tahun suatu perusahaan akan membuat laporan keuangan yang telah disusun menurut IAI berdasarkan SAK, yang nantinya disusun dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal perusahaan. Salah satu kepentingan perusahaan adalah untuk kepentingan instansi perpajakan yang dilaporkan selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Karena tidak semua kesatuan dalam SAK juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, sehingga jika suatu laporan keuangan yang semata-mata berdasarkan ketentuan SAK, maka tetap harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Tata Cara Perpajakan serta UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Perbedaan tersebut terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Beda Tetap

Perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Wajib pajak diberikan satu opsi saja untuk mengoreksi perbedaan yang timbul.

Contoh:

- a. Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
- b. Kerugian usaha di luar negeri
- c. Biaya-biaya yang tidak didukung bukti-bukti/ daftar nominatif
- d. Sanksi administrasi perpajakan, dan lain-lain.

2. Beda Waktu

Perbedaan yang sifatnya adalah pengalokasian jumlah dihubungkan dengan waktu antara SAK dan PPh. Pada prinsipnya jumlah pembekasan antara laporan komersial dan fiskal akan menemui jumlah kumulatif yang sama. Jadi yang membedakan hanyalah alokasi periode yang berjalan.

Contoh :

- a. Penyusutan
- b. Penilaian persediaan
- c. Rugi laba selisih kurs

Setelah diadakan penyesuaian atas pos-pos tertentu dalam laporan keuangan komersial, maka akan diperoleh hasil berupa koreksi positif yang akan menambah laba bersih kena pajak dan koreksi negatif yang mengurangi laba bersih kena pajak.

PT. Tansatrisna Maju Bersama dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan standard akuntansi keuangan yang menghasilkan laba komersial. Sementara untuk menghitung PPh, dasar perhitungannya adalah laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Disinilah peran koreksi fiskal mengakomodasi adanya perbedaan antara ketentuan SAK dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Laba rugi yang telah dilaksanakan koreksi fiskal tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan secara garis besar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis, menurut Sugiono(2013:53-55) jenis-jenis penelitian dapat di kelompokkan menurut tujuan, metode/pendekatan, ekplamasi, analisis dan jenis data, dan menurut metodenya dapat di kelompokkan menjadi

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenis penelitian menurut metode, maka jenis penelitian yang di buat penulis yaitu penelitian komperatif, karena bersifat membandingkan antara laporan keuangan menurut SAK dan menurut PAJAK.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini pada PT. Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang yang beralamatkan 8 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang di berikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau dengan cara menspesipikan variabel di ukur.

Variabel-variabel itu adalah

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR
1. Faktor penyebab perbedaan, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal	Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan meneurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus di desuaikan menurut ketentuan pajak.	- Undang Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 4,6 dan 9
2. Dampak perbedaan Perhitungan PPh badan	Perhitungan PPh badan adalah perhitungan yang menghitung pajak penghasilan yang terhutang yang di peroleh dari laba usaha dari dalam negri maupun pendapatan di luar negri yang harus di bayar dalam masa pajak.	- Undang-Undang No.36 tahun 2008 & ketentuan umum & tata cara perpajakan
3. Penyebab pengakuan biaya komersil dan fiskal	Penyebab adalah sebuah faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara biaya yang di akui komersil dan di akui fiskal.	- Undang-Undang No.36 tahun 2008, pasal 6,9

Sumber : Penulis, 2017

D. Data yang diperlukan

Data penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat melalui orang lain. Nur (2009: 146-147).

Data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi data laporan keuangan yang berupa laba rugi dan neraca tahun 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:62) menyatakan bahwa:Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.Teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek pajak penelitian. Data yang diperoleh merupakan data skunder yang diperoleh dengan cara mengambil data secara langsung.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen

3. Wawancara

Peneliti melakukan langsung opsi tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan sebanyak yang di dapatkan guna mengumpulkan informasi.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang mengumpulkan data yang di peroleh dari pihak ke dua berupa laporan keuangan perusahaan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2013:244) membedakan metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ada dua yaitu:

1. Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan berdasarkan sampel sehingga dapat di hitung untuk mendapat analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dan generalisasi”.

b. Analisis kuantitatif

Adalah penganalisisan data yang bukan berbentuk skala rasio tetapi dengan cara di perbandingkan sehingga menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan.

Dalam penelitian ini metode analisis yang di gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif di lakukan penulis dengan cara membandingkan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan menurut pajak .

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara perhitungan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertera di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan menurut pajak dimana di dalam laporan laba/rugi tersebut terdapat biaya² yang perlu di koreksi, dan dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Laporan keuangan menurut IAI

Penulis berfokus untuk melihat laporan laba/rugi perusahaan yang disusun menurut IAI yang tertera di dalam SAK bahwasannya seluruh biaya-biaya di akui dapat di bebaskan sebagai pengurang pajak.

b. Laporan keuangan menurut peraturan Pajak

laporan keuangan menurut pajak berbeda bahwasannya tidak seluruh biaya-biaya dapat di bebaskan sebagai pengurang pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Tansatrisna Maju Bersama (tangkas) merupakan perusahaan swasta berskala nasional yang bergerak dalam bidang penyedia sumber daya manusia dalam bidang keamanan (Security/Satpam) yang ditempatkan diberbagai perusahaan yang menjadi client dari PT Tangkas yang bermotokan mendidik dan menghasilkan jasa pengamanan yang terlatih disiplin cepat tuntas dan bertanggungjawab serta teruji dan berstandarkan internasional (ISO 9001-2008) dan OHSAS 18001-2007. PT Tansatrisna Maju Bersama (tangkas) resmi berdiri sejak tahun 2002 di Palembang sumatra selatan hingga saat ini pun total personil yang sudah direkrut menjapai 2.000 orang Semuanya sudah bekerja dan ditempatkan di semua wilayah dan berbagai tempat untuk di amankan seperti Pengamanan Kantor, kawasan, perumahan, apartemen, perkantoran, rumah sakit, hotel, gedung, pabrik, gedung pemerintah, mall, pusat perbelanjaan, pelabuhan, pelabuhan laut, baik di Sumsel maupun beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan PT Tangkas juga telah berekspansi atau membuka cabang di Lampung, Jakarta, Batam, Bangka dan Kalimantan Timur. Namun kantor pusat tetap di Palembang. Seiring berjalannya waktu, kita sudah melebarkan sayap usaha hingga ke empat provinsi, karena kita sadari kebutuhan pengamanan semakin meningkat, PT Tangkas juga sempat berpindah kantor yang

sebelumnya beralamatkan di Jl.Jendral Sudirman (depan pasar cinde) Palembang Sumatra Selatan dan sekarang beralamatkan di 8 ilir, ilir timur II, Palembang II R. Soekamto No 88 depan hotel novotel Palembang

2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi PT. Tansatrisna Maju Bersama (tangkas) Palembang yaitu :

a. Visi

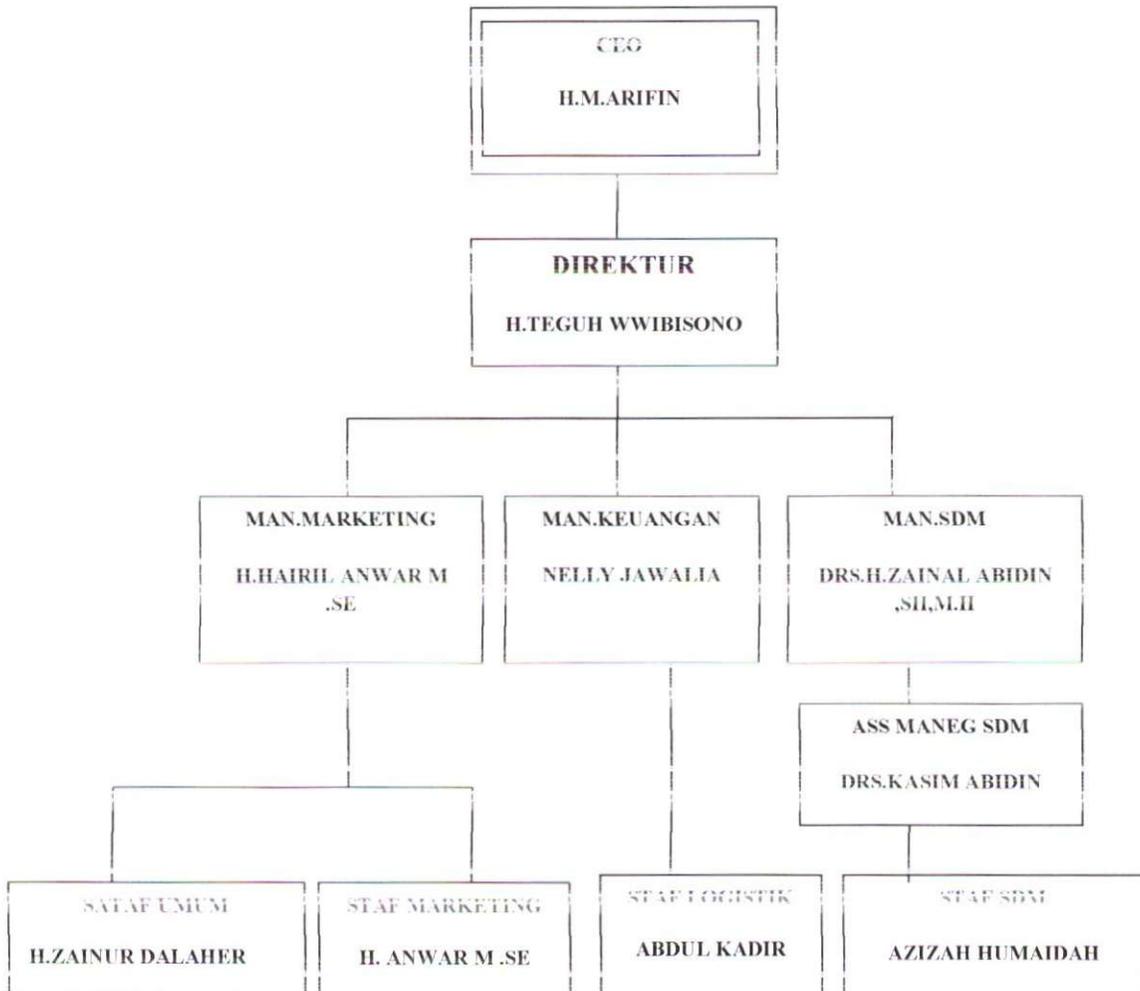
mewujudkan rasa aman dan percaya diri dalam berkarya dan berusaha bagi pengusaha mitra kerja.

b. Misi

PT.Tansatrisna Maju Bersama (tangkas) Palembang adalah sebagai berikut mengemban misi meningkatkan peran masyarakat untuk membantu aparat keamanan dan pemerintah dalam mewujudkan rasa aman sekaligus berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan investasi.

a. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
PT. Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang



Sumber : PT. Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) tahun 2016

Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian dari struktur organisasi PT. Tansatrisna Maju Bersama (tangkas) Palembang.

a. CEO

Pada dasarnya, undang-undang di Indonesia tidak mengenal istilah *Chief Executive Officer* (CEO). Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sunarno dalam artikel Ekspatriat Tetap Boleh Jadi Dirut Perusahaan mengatakan bahwa istilah CEO tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia, misalnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Namun dalam praktik posisi CEO sering digunakan untuk menunjuk jabatan manajerial tertinggi seperti presiden direktur atau direktur utama.

b. Direktur

Direktur utama adalah jabatan yang ditunjuk dan memberi laporan kepada Manager selain masih banyak lai seperti:

- 1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
- 3) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
- 4) Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.

- 5) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.
- 6) Memimpin seluruh Manger
- 7) Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau (CEO)
- 8) Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
- 9) Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
- 10) Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
- 11) Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting meeting BOD

c. Manejer Marketing

Seorang manajer pemasaran tidak hanya melihat kepada masa sekarang tetapi juga masa depan. Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuatnya. Seorang manajer pemasaran di perusahaan ini harus dapat melihat kesempatan/peluang pemasaran yang ada, contohnya di

perusahaan mana yang tingkat kriminalitasnya tinggi dan memerlukan keamanan, disinilah bagian manajer PT.Tangkas menawarkan dan memasarkan jasa keamanan yang sudah terlatih dan terdidik, manajer pun harus secara langsung dan tidak langsung menawarkan jasa keamanan dan merumuskannya menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya. Tugas Manajer Pemasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi
- 2) Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran
- 3) Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi

d. Manejer Keuangan

adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Sebagai jabatan penting dalam perusahaan, seorang manajer harus mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keuangan. Karena manajer keuangan tidak jauh dari analisis keuangan, perencanaan keuangan .

Manajer keuangan mempunyai utamanya sebagai berikut ini:

- 1) *Planning* atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas dan Rugi Laba.
- 2) *Budgeting* atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki.

- 3) *Controlling* atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan.
- 4) *Auditing* atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
- 5) *Reporting* atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

e. Manajer Sumber daya Manusia

Dalam sebuah perusahaan terutama yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan, Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang penting. Manajer SDM ini berperan dalam merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Mereka mengawasi perekrutan, mewawancarai, dan mempekerjakan karyawan baru, melakukan konsultasi dengan pimpinan puncak mengenai rencana strategis, bertindak sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya.

- 1) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah
- 4) Membuat laporan rekening koran (LRK).

- 5) Melaksanakan penerimaan dari transfer hasil penjualan lelang dan penerimaan lainnya dan melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit dan pembayaran pengeluaran lain-lain
- 6) Pembayaran uang kelebihan dan pembayaran pinjaman pegawai.

f. Staf Umum

bertugas Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai dan juga soal pemasaran jasa keaman serta membantu staf marketing, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.

- 1) Melaksanakan aktifitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
- 2) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan, untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
- 3) Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
- 4) Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.

- 5) Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan photocopy dan penjilidan
- 6) Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.

g. Staf Marketing

Tugas dan kewajiban Staff Marketing menerima perintah dari manajer marketing dan melaksanakannya dan selain itu pun ada beberapa seperti berikut:

- 1) membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator Marketing
- 2) membuat dan menyiapkan proposal dan profile Perusahaan guna mendukung kegiatan pemasaran
- 3) menjalin dan menjaga hubungan baik dengan klien-klien Perusahaan
- 4) menerima dan memfasilitasi permintaan-permintaan konsumen terhadap informasi mengenai produk jasa Perusahaan
- 5) menerima keluhan konsumen serta memberikan alternatif-alternatif solusi penyelesaian masalahnya
- 6) berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam Perusahaan dalam hal pelayanan pelanggan
- 7) menyusun dan memberikan laporan kegiatan pada Koordinator Marketing secara berkala
- 8) bertanggung jawab kepada Koordinator Marketing /Manjer Marketing

h. Staf Logistik

Tugas seorang staf logistik yaitu melakukan order barang yang di perlukan. Dalam hal ini, seorang logistik harus mempunyai daftar-daftar supplier barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang keperluan yang di butuhkan. Seorang logistik juga harus sering berkoordinasi dengan manajer keuangan soal biaya yang perlu di keluarkan dalam melakukan order keperluan perusahaan. dan pihak supplier supaya kebutuhan logistik barang tetap pada porsinya. Order barang bisa dilakukan via email, telephon, atau fax. tapi sebelumnya kita menghubungi pihak supplier bahwa kita akan melakukan order. Dalam negoisasi dengan supplier, tekankan jiwa bahwa pihak yang mengorder adalah raja sehingga seorang pekerja logistik harus tegas khususnya dalam memastikan kapan barang datang.

- 1) Menerima barang. Setelah melakukan order, pastikan barang datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Ketika barang sudah datang, maka seorang logistik lah yang menandatangani struk penerimaan barang. Setelah itu, pastikan barang yang diterima dalam keadaan baik dan jumlah yang dikirim sesuai dengan yang di order.
- 2) Invoice. Invoice merupakan penagihan, setelah faktur penjualan kita terima, masukkan semua dalam data faktur penagihan. Setelah semuanya selesai dilakukan, menyerahkan penagihan tersebut ke bagian staf keuangan untuk membayarnya.

- 3) Distribusi. Setelah semua selesai dan sudah pasti bahwa barang yang sudah sesuai dengan order, maka tugas selanjutnya adalah mendistribusikan barang-barang tersebut ke bagian-bagian produksi yang memerlukan.
- 4) Controlling. Setelah didistribusikan bukan berarti tugas seorang logistik selesai, seorang logistik masih harus memonitoring dan mengontrol bahwa barang tersebut digunakan dengan sewajarnya.

i. Asisten manajer SDMA\

sistem manajer bertugas membantu rekrutmen yang di lakukan manajer SDM dan lain sebagainya seperti berikut:

- 1) Membantu hal-hal yang berkaitan dengan tehnik manajemen SDM
- 2) Memahami akan hukum ketenagakerjaan
- 3) Membantu manajer SDM dalam menyampaikan komunikasi yang baik
- 4) Membantu menjekaskan mengenai deskripsi pekerjaan
- 5) Membantu dalam memberikan saran yang berkaitan erat dengan bidang manajemen dan pengembangan SDM
- 6) Harus menjadi contoh seorang leadership yang kuat.
- 7) Membantu manajer SDM berkomunikasi secara efektif.
- 8) bekerja keras dengan team work.
- 9) Harus berkomitmen yang tinggi

j. Staf SDM

Staf SDM mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tanggung jawab guna mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia untuk perusahaan yang bersangkutan;
- 2) Membuat sistem Human Resource yang efisien serta efektif, misalnya bikin SOP, job description, development system dan pelatihan;
- 3) Memiliki tanggung jawab dalam perekrutan karyawan baru bagi perusahaan yang bersangkutan; Memiliki tanggung jawab terhadap penggajian karyawan di perusahaan yang bersangkutan;
- 4) Bertanggung jawab terhadap absensi karyawan di perusahaan yang bersangkutan;
- 5) Bertanggung jawab terhadap tunjangan serta bonus untuk karyawan di perusahaan yang bersangkutan; Bertanggung jawab terhadap kontrak pegawai di perusahaan yang bersangkutan; dan Melakukan atau menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan.

b. Data Laporan Keuangan dan rincian biaya

Data yang digunakan untuk menganalisis biaya lain lain yang ada di laporan laba rugi, merupakan data data yang terdapat pada laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi pada tahun 2015 PT Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang

Tabel IV.1
Laporan Laba Rugi
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015

PENDAPATAN JASA	31.801.305.700
BEBAN POKOK	
Beban gaji dan upah	23.216.809.000
beban tidak langsung	1.683.932.149
Jumlah Beban Pokok	24.900.741.149
LABA KOTOR	6.900.564.551
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Gaji Karyawan	2.702.760.000
Listrik dan Air	30.845.325
Pos dan Telekomunikasi	42.700.442
Administrasi Kantor dan Perizinan	197.093.745
Biaya Asuransi	15.977.500
Transport dan Perjalanan Dinas	194.094.900
Service, Pemeliharaan dan Perlengkapan	46.409.898
Biaya Iklan	17.430.000
Pengobatan, Entertainmen dan Sumbangan	299.162.000
Biaya Lain-lain	615.441.358
Penyusutan Aset Tidak Lancar	493.198.619
Jumlah Beban Operasional	4.655.113.787
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Pendapatan Jasa giro	49.900.220
Pajak dan Administrasi Bank	(21.202.827)
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	28.697.394
LABA SEBELUN PAJAK	2.274.148.158
Pajak Penghasilan	631.466.503
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	1.642.681.655

Sumber : PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang Tahun 2016

Tabel IV.2
Rincian biaya sumbangan, entertainen.pengobatan
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Selama Tahun 2015

No	Biaya pengobatan, Entertainen, Sumbangan	Nominal
1	biaya sumbangan pengajian perbulan sebsar Rp.1.000.000x12	12.000.000
2	biaya sumbangan panti asuhan	2.000.000
3	biaya sumbangan fakir miskin bulan juni	500.000
4	biaya liburan karyawan setahun sekali per orang sebesar Rp.3.000.000	60.000.000
5	biaya amal jum'at perusahaan pada 20 karyawan	400.000
6	biaya sumbangan kebakaran	1.000.000
7	biaya sumbangan sukarela	100.000
8	biaya pengobatan karyawan	60.000.000
9	biaya sumbangan untuk keluarga karyawan yg meninggal	5.000.000
10	biaya sumbangan pendidikan SMA untuk anak alm anggota karyawan	3.400.000
11	biaya ganti rugi pengobatan kecelakaan karyawan	10.000.000
12	biaya sumbangan tahun baru untuk kegiatan yg di buat karyawan	5.000.000
13	biaya sumbangan pembelian sapi untuk qurban	50.000.000
14	biaya sumbangan sukuran	10.000.000
15	biaya sumbangan khitanan untuk anak dari anggota karyawan	5.000.000
16	biaya sumbangan kematian anggota karyawan	20.000.000
17	biaya sumbangan musola mifta hulzana	50.000.000
18	biaya sumbangan nikahan anggota karyawan	4.762.000
	Total	299.162.000

Sumber : PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang tahun 2016

Tabel IV.3
Rincian Biaya Lain-lain
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Selama Tahun 2015

No	Keterangan	Nominal
1	Biaya pembelian seragam	20.000.000
2	Tunjangan	133.200.000
3	Biaya honor Pelatihan	15.977.500
4	biaya PDB	10.279.400
5	biaya beasiswa magang	2.137.151
7	biaya sewa tempat pelatihan akhir	50.000.000
8	Bonus	50.000.000
9	Bungan bank	146.409.898
10	biaya umroh karyawan setahun sekali sebanyak 5 orang per orang Rp,25.000.000	125.000.000
11	biaya sanksi telat lapor PPh 21 untuk february	100.000
12	biaya olahraga futsal setiap minggu	3.600.000
13	Deviden	4.000.000
14	pembagian laba pemegang saham	54.737.409
	Total	615.441.358

Sumber : PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang Tahun 2016

Berdasarkan Tabel IV.1 ,Tabel IV.2 dan Tabel IV.3 di atas dapat dilihat di tabel IV 1 di dalam laporan laba rugi terdapat biaya iklan biaya entertainen, pengobatan, sumbangan dan biaya lain-lain terdapat biaya yang di akui pajak dan tidak di akui pajak , dan berdasarkan temuan yang ada pada saat akan melaporkan SPT tahunan terdapat biaya yang perlu di koreksi sebesar Rp.4.655.133.787

B. Pembahasan

Berikut ini disajikan koreksi fiskal untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang diakui menurut pajak dan yang tidak di akui pada PT.Tansatrisna Maju bersama (Tangkas) Palembang.

a) Koreksi Fiskal

Koreksi adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Koreksi ini dimaksudkan untuk meniadakan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam pengakuan penghasilan dan biaya.

Tabel IV.4
Koreksi Fiskal
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015

<u>KETERANGAN</u>	<u>KOMERSIAL</u>	<u>SELISIH</u>	<u>FISKAL</u>
PENDAPATAN JASA	31.801.305.700		31.801.305.700
BEBAN POKOK			
Beban gaji dan upah	23.216.809.000		23.216.809.000
beban tidak langsung	1.683.932.149		1.683.932.149
Jumlah Beban Pokok	24.900.741.149		24.900.741.149
LABA KOTOR	6.900.564.551		6.900.564.551
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Gaji Karyawan	2.702.760.000		2.702.760.000
Listrik dan Air	30.845.325		30.845.325
Pos dan Telekomunikasi	42.700.442		42.700.442
Administrasi Kantor dan Perizinan	197.093.745		197.093.745
Biaya Asuransi	15.977.500		15.977.500
Transport dan Perjalanan Dinas	194.094.900		194.094.900
Service,Pemeliharaan dan Perlengkapan	46.409.898		46.409.898
Bia Iklan	17.430.000		17.430.000
Pengobatan,Entertainmen dan Sumbangan	299.162.000	299.162.000	-
Biaya Lain-lain	615.441.358	187.437.409	428.003.949
Penyusutan Aset Tidak Lancar	493.198.619		493.198.619
Jumlah Beban	4.655.113.787		4.168.514.378

Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Jasa giro	49.900.220	49.900.220	-
Pajak dan Adminstrasi Bank	(21.202.827)	(21.202.827)	-
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	28.697.393	515.296.802	-
LABA SEBELUN PAJAK	2.274.148.157		2.732.050.173
Pajak Penghasilan	631.466.503		631.466.503
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	1.642.681.654		2.100.583.670

Sumber: Penulis, Hasil pengolahan data tahun 2017

Berdasarkan hasil koreksi fiskal di tabel IV.2 seluruh biaya tidak ada yang di akui oleh pajak karena bukan biaya yang bisa di bebaskan untuk mengurangi penghasilan yang ada di pasal 6 UUD No.36 Tahun 2008, sedangkan di tabel IV.3 nominal yang di akui hanya sebesar Rp 428.003.949 ternyata setelah di lakukan koreksi tidak semua biaya lain lain dapat di bebaskan ada beberapa yg bisa di bebaskan dan yang tidak bisa di bebaskan, berikut ini adalah rincian yang bisa di bebaskan dan tidak bisa di bebaskan menurut peraturan pajak:

Tabel IV.4
Rincian Biaya Lain-lain yang bisa di bebaskan
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Selama Tahun 2015

No	Keterangan	Nominal
1	Biaya pembelian seragam	20.000,000
2	Tunjangan	133.200,000
3	biaya honor pcatihan	15.977,500
4	biaya PBB	10.279,400

5	biaya beasiswa magang	2.137.151
7	biaya sewa tempat pelatihan akhir	50.000.000
8	Bonus	50.000.000
9	bunga bank	116.400.898
	Total	428.003.949

Sumber: Penulis, Hasil pengolahan data tahun 2017

Tabel IV.5
Rincian Biaya Lain-lain yang tidak bisa di bebaskan
PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang
Selama Tahun 2015

No	Biaya lain-lain	Nominal
1	biaya umroh karyawan setahun sekali sebanyak 5 orang per orang Rp,25.000.000	125.000.000
2	biaya sangsi telat lapor PPh 21 untuk february	100.000
3	biaya olahraga futsal setiap minggu	3.600.000
4	Deviden	4.000.000
5	pembagian laba pemegang saham	51.737.409
	Total	187.437.409

Sumber: Penulis, Hasil pengolahan data tahun 2017

b) UUD No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1) biaya pembelian bahan

- 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) bunga, sewa, dan royalty
 - 4) biaya perjalanan
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - 8) biaya administrasi; dan
 - 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 - 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah

c) UUD No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak Penghasilan

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Berdasarkan dari hasil koreksi fiskal dan UUD No.36 Tahun 2008 Pasal 6 dan pasal 9 dengan permasalahan terdapat temuan total biaya yang perlu di koreksi sebesar Rp.4.655.133.787. setelah di lakukan koreksi fiskal total biaya menurut komersil dan fiskal tidak sama. total biaya menurut fiskal sebesar Rp.4.168.514.378. jelas terjadi perbedaan total biaya menurut fiskal lebih kecil dibandingkan menurut komersial, jelas biaya yang besar dapat di bebaskan untuk pengurangan tapi tidak semua biaya dapat di bebaskan menurut pajak.

Setelah di lakukan koreksi fiskal penyebab terjadinya perbedaan terdapat biaya-biaya yang menurut perusahaan bisa di bebaskan dan menurut pajak tidak bisa, biaya yang tidak di akui pajak di perusahaan yaitu biaya Pengobatan,Entertainmen dan Sumbangan sedangkan tidak ada yang di akui pajak, sedangkan di biaya lain lain biaya yang di akui pajak hanya sebesar Rp.428.003.949. jelas berbeeda dengan biaya lain-lain di laporan laba rugi menurut perusahaan, setelah hasil koreksi terdapat biaya lain-lain yang tidak di akui pajak di tabel Tabel IV.5, jika koreksi tidak di lakukan

maka jelas laba sebelum pajak lebih kecil diakibatkan biaya yang besar dan bisa berpengaruh dalam perhitungan pajak terhutang dan berakibat kurang bayar

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Tansatrisna Maju Bersama(Tangkas) maka penulis menarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi laporan laba rugi yang di susun bagi perusahaan sebagai peyesuaian atas perbedaan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

- a. kemudian yang menjadi penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan akuntansi pajak adalah prinsip pengakuan biaya, laporan keuangan komersial menganggap bahwa seluruh biaya dapat di bebaskan sebagai pengurang penghasilan sedangkan menurut pajak tidak semua biaya dapat di bebaskan sebagai pengurang penghasilan, hal ini terbukti setelah di lakukan koreksi fiskal terdapat titik yang menjadi perbedaan di pos-pos biaya lain-lain dan biaya pengobatan, entertaimen, dan sumbangan.
- b. dampak rekonsiliasi/koreksi kenaikan terhadap besarnya pajak penghasilan PPh terhutang mengalami kenaikan setelah di lakukan koreksi fiskal dengan adanya kenaikan laba sebelum pajak atau penghasilan kena pajak maka nilai berdampak atas pajak terhutang perusahaan dan terjadi selisih atas laba sebelum pajak dan jika tidak di lakukan koreksi fiskal maka akan menjadi sebuah biaya kurang bayar.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka adapun saran yang penulis berikan kepada PT.Tansatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang yaitu :

1. Agar perusahaan bisa melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan.
2. Perusahaan sebaiknya selalui mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di indonesia baik melalui surat edaran yang di terbitkan oleh DJP, berita dan artikel yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno dan Estralita Trisna Wati. (2010). Akuntansi Perpajakan Edisi ke 2 Revisi . Jakarta: Selemba Empat
- Djoko Muljono & Baruni Wicaksono.(2010).Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- IAI.(2011).Modul Pelatihan Pajak Terapan Breveet A dan B Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Keiso, et al.(2010). Pengantar Akuntansi .Palembang : Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatra Selatan
- Kasmir (2013) “Analisis Laporan Keuangan.Edisi 1. Cetakan Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo.(2007). Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi
- Maltz, Adolf dan Milton F.Usry. (2006)Akuntansi Biaya, Jilid II. Edisi Ke Delapan. Jakarta: Erlangga
- Nurmantu.(2006). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Reeve Warren ,dkk.(2010). Pengantar Akuntansi.Palembang: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatra Selatan
- Siti resmi.(2009).Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Selemba Empat
- Sugiyono.(2013:224).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta
- Sumarsan ,(2010).Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT.Indeks Jakarta

Sukrisno dan Estalita Trisnawati.(2010:70-80). Akuntansi Pajak Edisi Ke 2 Revisi

Jakarta:Selemba Empat

Soemarso.(2008:3). Pengantar Akuntansi. Palembang: Ikatan Akuntan Indonesia

Wilayah Sumatra Selatan

Undang-Undang RI No.36 Tahun (2008) Tentang Perubahan Ke Empat Tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : SL.Media Buku Undang-Undang



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SANDIKA	PEMBIMBING :
NIM : 222012330	KETUA : Bertri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN LAPORAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. TANSATRISNA MAJU BERSAMA	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	20/12	Pada 15/12			
2.					
3.					
4.	17/10	Membahas			
5.					
6.					
7.	02/11	Membahas			
8.					
9.					
10.	25/11	Membahas			
11.					
12.	5/12	Pada 15/12			
13.					
14.					
15.	01/12	Skripsi + Menda			
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n Dekan

Program Studi :

Bertri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

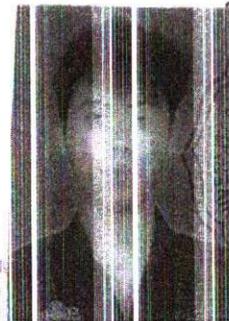
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

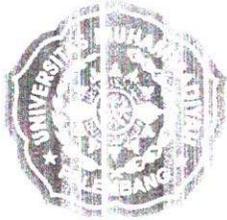
NAMA : SANDIKA
NIM : 222012330
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (25) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang Selasa, 19 Juli, 2016
n. Dekan



Wakil Dekan IV
Dr. Muhammad Ariadi M. Hum
NIM/NIDN : 731454/0215126902



MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEGIATAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS

No. 036/H-4/LPKKN/UMF/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : SANDIKA
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012330
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : KUNINGAN, 28-10-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 1 Ilir (A)
Kecamatan : Ilir Timur II
Kota/Kabupaten : Palembang
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
Rektor

Abid Dzazuli, S.E., M.M.


Palembang, 14 Maret 2016
Ketua LPKKN
Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email: lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Santika
Place/Date of Birth : Kuningan, October 28th 1993
Test Times Taken : +2
Test Date : February 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 51
Structure Grammar : 43
Reading Comprehension : 39
OVERALL SCORE : 44

Palembang, February 06th 2017

Chairperson of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
Etiy Susanti, S.Pd, M.A
Ulu, Muhammadiyah Palembang

NBM/NIEN. 1164032/0210098402

No. 467/TEA FEB/LB/UMP/II/2017

100 Certification

SURAT KETERANGAN

TAHUN 2016

Saya Atas Nama Direksi PT. Tangkas menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SANDIKA
NIM : 22 2012 330
Mata Kuliah : Perpajakan
Asal Lembaga : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai dalam pengambilan data-data, serta penelitian di perusahaan kami, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan.

Kami mengharapkan agar semua data, baik berupa dokumen maupun keterangan yang diperoleh dari perusahaan hanya diperuntungkan sebatas sebagai kajian ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 25 April 2016
HORMAT KAMI



TEGUH WIBISONO
Direktur

BIODATA PENELITI

Nama : Sandika

Nim : 22.2012.330

Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 28 Oktober 1993

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : JL.Politeknik LR.Khotib RT/RW:71/2 Bukit Lama
Palembang

Agama : Islam

No Handphone : 089-696-242-970

Email :

Nama Orang Tua

Ayah : Karyono

ibu : Nani Rohani

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PETANI

ibu : IBU RUMAH TANGGA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (D3)

Surat: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
Revisi: 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XIII/2015 (B)
Nomor: 771/SK/BAN-PT/Akred/Dp-III/VII/2015 (B)

Email: febumpig@unipalembang.ac.id

Alamat: Jalan Sekeloa Timur No. 101B, Palembang, Sumatera Selatan 30132. Telp: (0711)511482. Faksimile: (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senen, 20 Februari 2017
Waktu : 08.00 - 12.00
Nama : SANDIKA
Mata Kuliah Pokok : 22 2012 330
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN LAPORAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT.TANSATRISNA MAJU BERSAMA

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDAH**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Betri Sirajuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA	Pembimbing	9/3/2017	
2	M. Basyaruddin R,S.E.,Ak.,M.Si.,CA	Ketua Penguji	9/3/2017	
3	Betri Sirajuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA	Penguji 1	8/3/2017	
4	Aprianto, SE., M.Si	Penguji 2	8/3/2017	

Palembang, September 2017

Dekan

u. B. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806